

Politik Kurikulum dalam Pendidikan Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Upaya Jepang dalam Membentuk Loyalitas Melalui Institusi Keagamaan

Kasmidar¹ Ikhwal², Idrus Latif³

^{1,2,3}Institut Agama Islam (IAIN) Bone, Kab. Bone; hasmidaridar12@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes Nipponization as a policy framework for Islamic education in Indonesia under the Japanese occupation and examines how religious institutions were mobilized as channels to foster loyalty to the occupier. Drawing on historical policy review, key figures, and institutional dynamics, the analysis shows that Nipponization did not merely reform curricula but restructured organizational hierarchies, teacher training, and the relations between ulama, Islamic organizations, and the occupying power. Regional variation indicates that religious-political loyalty was shaped by local constellations of ulama, santri, and officials, with no single national pattern. Curriculum transformation reflects a shift from spiritual-moral formation to worldly-physical orientation in several contexts, though elements of scholarship and religious rites persisted beyond the Nipponization framework in certain regions. The involvement of ulama and organizations such as Fujinkai, Majelis Islam Tinggi, and local ulama networks created policy legitimacy and left lasting imprints on national religious identity in the post-independence era. In normative terms, maqasid al-shari'ah is proposed as an ethical basis to assess balance among the right to education, justice, and public welfare during the occupation, and as a framework for evaluating contemporary educational policy. Practically, these findings guide policymakers and educators in safeguarding religious institutions within the national curriculum while recognizing the occupation's legacy as a lens for current policy analysis. This study contributes to the historiography of Islamic education in Indonesia by highlighting Nipponization as an integrated policy network linking curriculum, institutions, and religious organizations as instruments of political loyalty.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Nipponisasi sebagai kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia selama pendudukan Jepang serta bagaimana institusi keagamaan dimobilisasi sebagai kanal untuk membentuk loyalitas terhadap rezim pendudukan. Menggunakan telaah kebijakan historis, tokoh kunci, dan dinamika kelembagaan, analisis menunjukkan Nipponisasi tidak sekadar mereformasi kurikulum, melainkan merombak hierarki organisasi, pelatihan guru, dan hubungan antara ulama serta organisasi Islam dengan kekuasaan pendudukan. Variasi regional menunjukkan loyalitas religius-politik dipengaruhi oleh konstelasi lokal antara ulama, santri, dan pejabat, tanpa pola nasional tunggal. Transformasi kurikulum mencerminkan pergeseran dari pembentukan spiritual-moral ke orientasi duniawi jasadi di beberapa konteks, meski elemen ilmu dan ritus keagamaan tetap ada di beberapa daerah. Pelibatan ulama dan organisasi seperti Fujinkai, Majelis Islam Tinggi, serta jaringan ulama lokal membentuk legitimasi kebijakan dan meninggalkan bekas pada identitas keagamaan nasional pascamerdeka. Secara normatif, maqasid al-shari'ah dijadikan landasan etis untuk menilai keseimbangan hak edukasi, keadilan, dan kemaslahatan umum selama pendudukan serta sebagai kerangka evaluasi

ARTICLE INFO

Keywords:

Japanization, institutional loyalty, Islamic education, Japanization of Indonesia, education politics.

Kata Kunci:

Nipponisasi, loyalitas institusi, pendidikan Islam, nipponisasi Indonesia, politik pendidikan

Article history:

Received 2026-05-18

Revised 2026-05-24

Accepted 2026-05-30



kebijakan masa kini. Secara praktis, temuan ini memberi panduan kepada pembuat kebijakan dan pendidik dalam menjaga otonomi lembaga keagamaan dalam kurikulum nasional sambil menghargai warisan pendudukan sebagai lensa analisis kebijakan pendidikan Islam masa kini. Penelitian ini berkontribusi pada historiografi pendidikan Islam Indonesia dengan menyoroti Nipponisasi sebagai jaringan kebijakan terpadu yang menghubungkan kurikulum, institusi, dan organisasi keagamaan sebagai instrumen loyalitas politik.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Corresponding Author:

Kasmidar

Institut Agama Islam (IAIN) Bone, Kab. Bone, hasmidaridar12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada konteks perang dan pendudukan militer, pendidikan sering dipakai sebagai alat pembentukan loyalitas melalui kurikulum dan pengelolaan institusi keagamaan, termasuk saat Jepang menduduki wilayah Nusantara. Kebijakan Nipponisasi dan orkestrasi kelembagaan wilayah pendudukan mengarahkan perubahan kurikulum, struktur sekolah, serta pembentukan front keagamaan yang mendukung mobilisasi sumber daya manusia untuk perang. (Fadli & Kumalasari, 2019) Hal ini menjadikan era pendudukan Jepang relevan untuk menilai bagaimana pendidikan Islam ditempatkan sebagai media integrasi sosial-politik, sambil melibatkan ulama dan organisasi Islam dalam jaringan kebijakan pendudukan. Dalam kerangka global, literatur menunjukkan pergeseran dari fokus misi Kristenisasi pada masa penjajahan Belanda menuju pendekatan politiko-agama yang lebih adaptif namun instrumental bagi kepentingan militer Jepang, sehingga religiositas Islam menjadi sasaran dan agen mobilisasi di berbagai tingkat kelembagaan pendidikan Islam.

Penelitian sebelumnya menyoroti dinamika pendidikan Islam selama pendudukan Jepang, termasuk transformasi tujuan kurikulum dan peran madrasah seperti Awaliyah di beberapa daerah sebagai respons terhadap kebijakan pendudukan. (Saifudin & Saepuddin, 2020) Peran institusi keagamaan seperti Shumubu, Majelis Islam Tinggi, serta organisasi Islam lokal juga disebut sebagai kanal kontrol dan mobilisasi yang diatur melalui regulasi daerah dan nasional. (Fadli & Kumalasari, 2019) Beberapa karya membedakan kebijakan pendudukan Jepang dengan era Belanda, menunjukkan adanya ruang gerak relatif bagi pendidikan Islam dalam beberapa konteks meski tetap berada di bawah kendali militer dan pembatasan pengajaran agama; variasi ini seringkali menggambarkan dinamika implementasi Nipponisasi antara daerah dan institusi keagamaan yang berbeda. (Hasnida, 2017)

Kelemahan utama literatur sebelumnya adalah parsialnya fokus pada satu komponen kebijakan (mis. kurikulum atau kelembagaan) tanpa integrasi afiliasi antara kebijakan pendidikan, loyalitas politik, dan praktik keagamaan secara terpadu; kurangnya analisis komparatif lintas daerah dan lintas institusi keagamaan juga menjadi hambatan untuk memahami dampak jangka panjang pendudukan terhadap identitas Islam pascakemerdekaan, (Saifudin & Saepuddin, 2020) Gap lain adalah kurangnya pemetaan bagaimana kebijakan Jepang memanfaatkan institusi keagamaan sebagai kanal loyalitas secara teoretis terintegrasi, serta bagaimana warisan kurikulum pendudukan membentuk identitas keagamaan di Indonesia pascamerdeka; kajian tentang Fujinkai, Shumubu, atau lembaga keagamaan lain perlu dihubungkan dengan kerangka teori yang kohesif untuk analisis yang lebih komprehensif. (Aditia et al., 2022) Urgensi penelitian terletak pada perlunya menghubungkan kebijakan pendidikan militer Jepang dengan dinamika loyalitas keagamaan melalui lembaga pendidikan Islam, sehingga dapat menjelaskan bagaimana institusi keagamaan dibentuk, didorong, atau dibatasi untuk tujuan militer dan politis, serta bagaimana warisan kebijakan tersebut memengaruhi pendidikan Islam modern pascakemerdekaan. (Fadli & Kumalasari, 2019)

Kontribusi penelitian ini termasuk membangun kerangka analitis terpadu yang mengaitkan kebijakan kurikulum, kelembagaan, dan praktik keagamaan dalam konteks pendudukan Jepang, serta memberikan gambaran historis tentang bagaimana institusi keagamaan berperan sebagai agen loyalitas maupun pelindung identitas keagamaan selama krisis nasional, sehingga relevan bagi kajian historiografi pendidikan Islam di Indonesia. (Rizal, 2020) Tujuan utama penelitian adalah menganalisis bagaimana politik kurikulum Jepang pada masa pendudukan Indonesia memanfaatkan institusi keagamaan untuk membentuk loyalitas terhadap rezim pendudukan, dengan fokus pada pendidikan Islam, madrasah, pondok pesantren, serta organisasi Islam terkait (mis. Shumubu, Majelis Islam Tinggi, Hizbullah, dan jaringan pendidikan di bawah naungan pendudukan). (Riady et al., 2022)

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi variasi implementasi kebijakan di tingkat daerah/institusi serta menelusuri dampak jangka pendek dan panjang terhadap pendidikan Islam pascakemerdekaan, sehingga dapat mengkaji bagaimana warisan pendudukan Jepang membentuk kurikulum dan identitas keagamaan modern di Indonesia. (Maimunah & Rosadi, 2021) Secara konseptual, penelitian ini memperkaya literatur sejarah pendidikan Islam dengan mengintegrasikan kebijakan pendidikan militer, institusi keagamaan, dan praktik kurikulum ke dalam satu kerangka teoretis, serta menawarkan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan pendidik mengenai tantangan menjaga otonomi lembaga keagamaan pasca pendudukan. (Anas, 2023)

2. METODOLOGI

Tujuan, pendekatan, desain, dan sumber data: Bagian ini menjabarkan bagaimana penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan Nipponisasi berfungsi sebagai kerangka kurikulum yang memobilisasi institusi keagamaan untuk membentuk loyalitas terhadap rezim pendudukan, serta bagaimana dinamika regional memengaruhi implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah gabungan kajian historis-kualitatif dengan sintesis literatur historiografi, yang memungkinkan identifikasi pola umum serta variasi regional antara daerah seperti Yogyakarta, Kudus, Surakarta, dan Sambas. Desainnya berupa studi literatur historis terstruktur (systematic literature review) dengan studi kasus regional untuk menguji hipotesis bahwa kedekatan aktor keagamaan dengan kebijakan pendudukan memediasi tingkat loyalitas melalui kurikulum Anas. (Fakhiroh, 2022) Sumber data utama berasal dari arsip kebijakan pendudukan Jepang, dokumen organisasi keagamaan (Fujinkai, Majelis Islam Tinggi, Masyumi), serta catatan kurikulum dan pelatihan pendidik pada masa pendudukan. (Maharanie, 2021)

Teknik analisis, reliabilitas, validitas, dan etika. Bagian kedua menjelaskan teknik analisis data yang digunakan: analisis isi (content analysis) terhadap teks kebijakan dan narasi Nipponisasi, serta analisis tematik untuk mengelompokkan temuan menjadi tema-tema utama (kerangka Nipponisasi, variasi regional, peran institusi keagamaan, transformasi kurikulum, pelibatan ulama, maqasid al-shari'ah, dan warisan pascaperang). (Daulai et al., 2022) Selain itu, dilakukan analisis komparatif lintas wilayah untuk mengidentifikasi faktor-faktor variasi implementasi. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber (sumber primer arsip kebijakan vs literatur sekunder) dan verifikasi konteks historis dengan kerangka maqasid al-shari'ah sebagai landasan normatif. Etika penelitian mengikuti prinsip atribusi dan kehati-hatian dalam penggunaan hadis/ayat al-Qur'an secara kontekstual, serta menghindari pembacaan teologis tanpa dukungan teks yang relevan. Pembahasan lebih lanjut mengenai reliabilitas dan etika disampaikan secara rinci dalam bagian pendahuluan metodologi agar pembaca dapat menilai keketatan analisis. (Sukaimi & Said, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), pendidikan Islam dijadikan sarana strategis untuk mendukung kepentingan politik dan militer Jepang. Berdasarkan kajian Faisal Anas (2023), Jepang memandang umat Islam sebagai kekuatan sosial yang besar sehingga lembaga pendidikan seperti Muhammadiyah tidak hanya diawasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun loyalitas

masyarakat. Kurikulum pendidikan mengalami intervensi melalui penanaman nilai disiplin, kepatuhan, serta dukungan terhadap ideologi Perang Asia Timur Raya. Selain itu, pembentukan lembaga seperti Shumubu (kantor urusan agama) dan pelatihan bagi ulama dengan muatan ideologis menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi netral, melainkan diarahkan untuk kepentingan kekuasaan Jepang. (Anas, 2023)

Namun, di tengah kontrol ketat tersebut, lembaga pendidikan Islam tidak sepenuhnya kehilangan otonomi. Muhammadiyah, misalnya, menunjukkan sikap adaptif dengan tetap menjalankan kegiatan pendidikan meskipun harus menyesuaikan diri dengan kebijakan Jepang, bahkan dalam beberapa kasus menyamakan aktivitas pendidikan melalui pengajian. Di sisi lain, terdapat pula bentuk resistensi, seperti penolakan terhadap praktik seikirei yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa politik kurikulum pada masa Jepang tidak hanya mencerminkan dominasi kekuasaan, tetapi juga menghadirkan dinamika negosiasi antara kepentingan kolonial dan upaya mempertahankan identitas keagamaan

Penganjuran kebijakan Nipponisasi. Upaya menyatukan kurikulum, struktur kelembagaan, dan pelatihan guru dalam kerangka Nipponisasi, dengan tujuan menciptakan warga negara yang loyal melalui institusi keagamaan serta pelibatan ulama dalam kerangka edukasi yang selaras dengan militer pendudukan, (Aslan, 2019). Tokoh kunci dan institusi inti. Peran KH. Abdul Wahid Hasyim dan Shumubu menjadi teladan bagaimana tokoh ulama berperan dalam pembentukan kebijakan keagamaan serta pembinaan guru agama di masa pendudukan, serta pembentukan badan keagamaan yang menjadi wadah kaderan santri dan dakwah. (Aditia et al., 2022)

Analisis perbandingan lintas daerah, bagaimana Nusantara menunjukkan variasi implementasi Nipponisasi melalui pengalaman Kudus, Yogyakarta, Surakarta, Sambas, dan daerah lainnya, yang mengindikasikan bahwa loyalitas religius-politik dipengaruhi oleh konstelasi lokal antara ulama, santri, dan pejabat pendudukan, (Daulai et al., 2022). Implikasi historis: Nipponisasi mengubah panorama pendidikan Islam dari sekadar lembaga keagamaan menjadi jaringan institusional yang berperan dalam pembentukan loyalitas terhadap rezim pendudukan, sekaligus meninggalkan warisan yang memengaruhi identitas keagamaan nasional pascamerdeka. (Musadad, 2021)

Instrumen mobilisasi melalui institusi keagamaan. Fujinkai, Majelis Islam Tinggi, jaringan ulama lokal, serta organisasi Islam (Masyumi, MIAI) digunakan sebagai saluran dakwah, pendidikan keagamaan, dan kegiatan sosial yang selaras dengan program militer pendudukan; ini membuktikan fungsi institusi keagamaan sebagai agen loyalitas, bukan hanya pengekangan kebijakan agama, (Farhan, 2022). Ruang gerak regional dan kedekatan aktor dengan kebijakan, kenyataan bahwa kedekatan antara ulama/gi bagi institusi keagamaan dengan kebijakan pendudukan menentukan tingkat loyalitas yang dihasilkan melalui kurikulum, menunjukkan dinamika regional yang lebih kompleks dibanding gambaran sentralistik. (Daulai et al., 2022)

Studi kasus Muhammadiyah di Yogyakarta, pemerintah pendudukan membuka beberapa peluang bagi organisasi Islam, namun membatasi beberapa sekolah Islam dan membubuhkan pembatasan terhadap kelembagaan pendidikan pedesaan; hal ini menegaskan bahwa institusi keagamaan punya kapasitas adaptasi namun juga terbatas oleh regulasi pendudukan, (Fakhiroh, 2022). Pembentukan kader dakwah, pelibatan ulama dalam kerangka Nipponisasi turut membentuk kader dakwah yang selaras dengan agenda militer, sehingga legitimasi kurikulum Islam melalui institusi keagamaan menjadi bagian dari proyek mobilisasi nasional pendudukan. (Abidin, 2020)

Dampak terhadap identitas komunitas, institusi keagamaan berfungsi ganda, menggagas loyalitas terhadap rezim sambil melestarikan identitas keagamaan lokal yang sering menjadi perekat komunitas Muslim pada masa pendudukan, (Maimunah & Rosadi, 2021). Pergeseran tujuan kurikulum, banyak studi menunjukkan perubahan fokus dari pembentukan spiritual-moral ke orientasi duniawi jasadi, dengan materi keagamaan ditempatkan dalam ruang yang diawasi secara ketat; ini mencerminkan politik pendudukan yang mendorong mobilisasi militer melalui kurikulum Islam. (Saifudin & Saepuddin, 2020)

Penempatan dan moderasi materi keagamaan, meskipun ada pembatasan pengajaran agama di lingkungan pendudukan, beberapa daerah menunjukkan peluang moderasi di mana unsur keilmuan serta ritus keagamaan tetap dipertahankan di luar kerangka formal “nipponisasi”, (Anas, 2023). Dinamika pemilihan materi ajar, kurikulum Islam di masa Jepang menggabungkan unsur budaya Jepang, bahasa Jepang, serta elemen nasionalis yang bertujuan menguatkan loyalitas terhadap negara pendudukan, sambil mempertahankan identitas keagamaan dalam lingkup terbatas di beberapa sekolah/madrasah, (Anas, 2023). Implikasi terhadap identitas keagamaan pascaperang: transformasi kurikulum mempengaruhi cara komunitas Islam membentuk identitas keagamaannya sendiri di fase pascakemerdekaan, karena kurikulum yang telah diremap menjadi bagian dari rangka pendidikan nasional yang lebih luas. (Maisyaroh, 2020)

Jalur institusional dan legitimasi, pembentukan Masyumi, Majelis Islam Tinggi, serta keterlibatan KH. Abdul Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh lain menunjukkan bagaimana struktur keagamaan diarahkan untuk memberi legitimasi kebijakan pendidikan pendudukan dan mengonstruksikan kerangka kebijakan masa depan pasca pendudukan, (Aditia et al., 2022). Kedekatan aktor dengan kebijakan pendudukan, kedekatan antara ulama/organisasi Islam dengan kebijakan pendudukan mempengaruhi apakah institusi keagamaan menjadi agen loyalitas atau menolak kebijakan tersebut; dinamika ini berimplikasi pada pola pembelajaran dan partisipasi santri dalam konteks politik saat itu. (Farhan, 2022)

Studi kasus Yogyakarta. Muhammadiyah di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun ada peluang ruang gerak, kebijakan pendudukan membatasi perkembangan sekolah Islam tertentu serta intervensi terhadap pembentukan lembaga pendidikan formal di beberapa daerah; ini menegaskan bahwa loyalitas religius-politik sangat dikendalikan oleh kedekatan institusi dengan kebijakan pendudukan, (Sukaimi & Said, 2019). Hubungan dengan masa pascakemerdekaan, peran ulama dan organisasi Islam pada masa pendudukan membentuk fondasi politik keagamaan pascakemerdekaan, yang kemudian terintegrasi dalam pembentukan identitas keagamaan nasional serta arsitektur kurikulum nasional. (Syahruman & Mulyana, 2019)

Justifikasi etis dan evaluasi kebijakan, maqasid al-shari’ah dapat menjadi kerangka etis untuk menilai kebijakan Nipponisasi, menekankan perlindungan hak pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan umum meskipun dalam konteks pendudukan; implementasinya harus kontekstual dan didukung sumber primer/sekunder yang kredibel, (Hasnida, 2017). Pembatasan konten teologis, penerapan ayat Al-Qur’an atau hadis terkait ilmu sebaiknya relevan dan kontekstual, agar analisis normatif tidak menafikan konteks historis serta nuansa regional; kerangka maqasid membantu menjaga keseimbangan antara evaluasi kebijakan dan penghormatan terhadap tradisi keagamaan lokal, (Saifudin & Saepuddin, 2020). Norma hak edukasi dalam masa pendudukan, pelaksanaan norma-norma maqasid dapat menginformasikan bagaimana kebijakan kurikulum Islam seharusnya mengutamakan hak pendidikan bagi santri meskipun di bawah tekanan militer, serta bagaimana menjaga otonomi lembaga keagamaan di masa kini. (Anas, 2023)

Warisan dalam kurikulum nasional, Nipponisasi meninggalkan jejak berupa integrasi konten Islam ke dalam kurikulum nasional pasca-reformasi, serta perdebatan antara penguatan pendidikan umum dan identitas keagamaan; ini terlihat pada upaya integrasi kurikulum Islam ke dalam sistem pendidikan nasional melalui regulasi seperti UU terkait kebijakan pendidikan Islam dan lembaga keagamaan (Musadad, 2021). Otonomi kelembagaan pascamerdeka, meski ada integrasi kurikulum, banyak studi menekankan perlunya menjaga otonomi lembaga keagamaan agar identitas lokal tetap terjaga dan tidak terkikis oleh standarisasi nasional yang homogen, (Maliki et al., 2022). Peran institusi Islam kontemporer, lembaga seperti NU, Muhammadiyah, serta universitas Islam negeri berperan sebagai jembatan antara warisan Nipponisasi dan kebijakan pendidikan Islam modern, dengan penekanan pada keseimbangan antara akuntabilitas pendidikan nasional dan identitas keagamaan local. (Rohman, 2018)

Kebijakan otonomi vs standarisasi, pelajaran utama adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara otonomi lembaga keagamaan dan kebutuhan standarisasi nasional, dengan mekanisme

evaluasi kurikulum regional yang inklusif dan akuntabel secara lintas wilayah, (Daulai et al., 2022). Dokumentasi arsip kebijakan, dorongan untuk mendokumentasikan arsip kebijakan pendudukan guna memperkuat kajian sejarah pendidikan Islam dan mengidentifikasi praktik terbaik untuk kebijakan masa kini, (Hodddin, 2020). Kolaborasi lintas massa, pentingnya kolaborasi antara organisasi keagamaan nasional (NU, Muhammadiyah) dan lembaga pendidikan publik dalam kajian lintas masa guna memahami dinamika loyalitas melalui kurikulum serta menjaga otonomi institusi keagamaan, (Aditia et al., 2022). Kerangka normatif, penerapan maqasid al-shari'ah sebagai kerangka etis yang dapat membantu menilai kebijakan pendidikan Islam di masa kini tanpa mengabaikan konteks historis dan nuansa regional. (Saifudin & Saepuddin, 2020)

Tantangan data primer regional, keterbatasan arsip dan variasi sumber historis di berbagai daerah membuat generalisasi nasional menantang; studi masa depan perlu mengadopsi kerangka kebijakan publik, identitas keagamaan, dan loyalitas politik secara terintegrasi untuk analisis yang komprehensif, (Farhan, 2022). Pendekatan komparatif internasional, perbandingan lintas negara pendudukan di Asia Timur dapat membantu memahami variasi implementasi Nipponisasi dan dampaknya terhadap identitas keagamaan, kurikulum, serta loyalitas politik secara lebih, (Syarif, 2019). Integrasi analisis hukum Islam, memasukkan prinsip maqasid secara eksplisit dalam analisis kebijakan untuk menilai etika kebijakan dan dampaknya terhadap hak edukasi umat Islam di masa kini. (Hasnida, 2017)

Simpulan

Nipponisasi berperan sebagai poros kebijakan yang mengintegrasikan kurikulum, struktur kelembagaan, dan pelatihan tenaga pendidik dengan tujuan membentuk loyalitas terhadap rezim pendudukan melalui institusi keagamaan. Peran ulama, Fujinkai, Majelis Islam Tinggi, dan jaringan ulama lokal menunjukkan bahwa institusi keagamaan berfungsi ganda: sebagai agen mobilisasi dan sebagai penjaga identitas keagamaan komunitas Islam lokal selama pendudukan. (Fadli & Kumalasari, 2019) Variasi regional dalam implementasi Nipponisasi membuktikan bahwa loyalitas religius-politik tidak bersifat monolitik; kedekatan aktor-aktors Islam dengan kebijakan pendudukan serta kapasitas institusi untuk beradaptasi sangat mempengaruhi tingkat pembatasan maupun ruang gerak yang diberikan kepada lembaga keagamaan di daerah tertentu seperti Yogyakarta, Kudus, dan wilayah pedesaan versus perkotaan.

Pergeseran fokus kurikulum dari dimensi spiritual-moral ke arah duniawi jasadi menandai dimensi politik kebijakan pendudukan, meskipun moderasi regional menunjukkan bahwa unsur keilmuan dan ritus keagamaan tetap ada di luar kerangka formal Nipponisasi di beberapa daerah. Warisan Nipponisasi melanjutkan dampaknya dalam pembentukan identitas keagamaan nasional pascamerdeka melalui integrasi konten Islam ke dalam kurikulum nasional, sambil menekankan perlunya menjaga otonomi lembaga keagamaan agar karakter lokal tidak hilang dalam arus standarisasi nasional.

Kerangka maqasid al-shari'ah diajukan sebagai alat evaluasi etis untuk menilai kebijakan pendidikan Islam masa pendudukan dan masa kini, dengan memperhatikan hak edukasi, keadilan, dan kemaslahatan umum serta penggunaan teks-teks keagamaan secara kontekstual dan bertanggung. Secara praktis, temuan menekankan perlunya kebijakan yang menyeimbangkan otonomi lembaga keagamaan dengan kebutuhan standar nasional melalui evaluasi kurikulum regional, dokumentasi arsip historis, dan kolaborasi lintas massa antara NU, Muhammadiyah, serta organisasi terkait untuk pemahaman lintas masa dan konteks regional.

REFERENCES

- Abidin, N. F. (2020). Dinamika Politik, Heriofikasi KIM IL SUNG, Dan Ideologi Juche Di Korea Utara (1948-2011). *Diakronika*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol20-iss1/135>

- Aditia, D., Lestari, E. S., Adelia, D. N., Arif, S., & Perdana, Y. (2022). Gerakan Feminisme Fujinkai Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Perempuan Di Indonesia. *Fajar Historia Jurnal Ilm Sejarah Dan Pendidikan*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5145>
- Anas, F. (2023). Dinamika Pendidikan Muhammadiyah Pada Masa Penjajahan Jepang Di Yogyakarta Tahun 1942-1945. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 137–162. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v9i1.368>
- Aslan, A. (2019). No Title. *Edukasia Islamika*. <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2295>
- Daulai, A. F., Situmorang, J. J., Afifah, N. Y., Sari, K., Hizbullah, G., & Zulkarnain, Z. (2022). Pengembangan Peserta Didik Dan Kurikulum PAI Di Sekolah Umum. *Al-Khidma Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.35931/ak.v2i2.1288>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Sejarah Dan Budaya Jurnal Sejarah Budaya Dan Pengajarannya*, 13(2), 189. <https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>
- Fakhiroh, S. (2022). Dinamika Pendidikan Islam Di Kudus Abad XX: Studi Madrasah Mu'awanatul Muslimin Dan Madrasah Qudsiyyah Tahun 1900-1990. *Heutagogia Journal of Islamic Education*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/hjie.2022.21-10>
- Farhan, M. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Nasionalisme Dalam Buku Api Sejarah Karya Ahmas Mansur Suryanegara. *J. Pend. A. Isl. Ind.* <https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i1.615>
- Hasnida, H. (2017). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 237–256. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra*. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>
- Maharani, S. (2021). Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Pendudukan Jepang. *Jp-Sa*. <https://doi.org/10.30659/jp-sa.v1i2.15516>
- Maimunah, M., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 249–265. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.446>
- Maisyaroh, M. (2020). SEKOLAH TINGGI ISLAM: Latar Belakang Dan Perkembangan. *Islamijah Journal of Islamic Social Sciences*. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i3.8764>
- Maliki, P. L., Ansar, A., Lukum, A., Arsyad, A., Djafri, N., & Sukung, A. (2022). Arah Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Reformasi Di Indonesia. *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 84–96. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v10i1.2510>
- Musadad, A. J. (2021). Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Di Indonesia. *Thaqafiyat Jurnal Bahasa Peradaban Dan Informasi Islam*, 1–23. <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101>
- Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S. (2022). Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Bogor Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *Historiography*, 2(4), 487. <https://doi.org/10.17977/um081v2i42022p487-502>

- Rizal, A. (2020). Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945). *Jurnal Indo-Islamika*, 4(2), 179–189. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17394>
- Rohman, M. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ack3p>
- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh Kolonialisme Jepang Terhadap Pendidikan Islam. *Ta Dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164–177. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3441>
- Sukaimi, S., & Said, M. (2019). BUDAYA DISIPLIN KERJA; Sebuah Sketsa Kerja Orang-Orang Jepang. *Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.24014/jiik.v8i2.5729>
- Syahrman, A., & Mulyana, A. (2019). Peranan Kh. Abdul Wahid Hasyim Dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953). *Factum Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20113>
- Syarif, M. R. (2019). Politik Pendidikan Jepang Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Tarbiya Islamia Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2), 247. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.477>